

RILIS PUBLIK
REFERENSI ANALISA DAN REKOMENDASI
SISTEM MANAJEMEN KELANGSUNGAN USAHA (SMKU) ATAS DEMONSTRASI
DI INDONESIA

Nomor : 176/Kom/0925

Tingkat Kewaspadaan Saat Ini : *Medium - High*

[Jakarta, 02 September 2025] — Menyikapi situasi aksi demonstrasi masif dan destruktif yang saat ini berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sejak 25 Agustus 2025, *Indonesian Continuity and Resilience Association* (InCRA), organisasi profesi bidang manajemen kelangsungan dan ketangguhan usaha di Indonesia perlu menyampaikan hasil analisa dan rekomendasi respon Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) SNI ISO 22301:2018, sebagai berikut:

1. Analisis Situasi (per 2 September)

Eskalasi aksi demonstrasi di sejumlah wilayah di Indonesia telah meningkatkan risiko operasional bagi dunia usaha, yang berpotensi menyebabkan disrupsi dalam beberapa area, diantaranya:

- **Risiko Keamanan Fisik:** Risiko terhadap aset perusahaan dan keselamatan personel.
- **Risiko Gangguan Operasional:** Blokade jalan, gangguan transportasi publik, dan pembatasan mobilitas yang menghambat rantai pasok dan akses karyawan ke lokasi kerja.
- **Risiko Keamanan Siber:** Peningkatan serangan siber yang memanfaatkan situasi politik untuk menargetkan infrastruktur kritis atau perusahaan ternama.
- **Risiko Reputasi:** Keterkaitan atau persepsi keterkaitan perusahaan dengan isu politik dan keamanan yang sensitif.
- **Risiko Stabilitas Ekonomi:** Volatilitas nilai tukar Rupiah dan sentimen negatif pasar yang memengaruhi iklim usaha.

2. Rekomendasi

Berdasarkan situasi di atas maka kami merekomendasikan agar Tim Manajemen Krisis (*Crisis Management Team - CMT*) perlu diaktifkan untuk mengimplementasikan langkah-langkah respons insiden dalam kerangka SMKU. Tahapan respons insiden dan rencana aksi SMKU yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Fase 1: Kesiapan dan Peningkatan Kewaspadaan (*Immediate Actions*)

Tujuan: Memastikan kesiapan seluruh elemen organisasi untuk menghadapi potensi eskalasi.

- Aktivasi Tim Manajemen Krisis (CMT):
 - Aksi: Lakukan *kick-off meeting* darurat CMT. Tetapkan frekuensi pertemuan (misal: setiap 12 atau 24 jam) untuk mengevaluasi situasi.
 - Penanggung Jawab: Ketua CMT (CEO/Direktur).
- Pemantauan Situasi:
 - Aksi: Bentuk tim kecil (terdiri dari tim Keamanan, Humas, dan Legal) untuk memantau perkembangan situasi 24/7 dari sumber-sumber kredibel (media massa terverifikasi, laporan otoritas keamanan, dan pernyataan resmi pemerintah).
 - Output: Buat laporan situasi singkat (*flash report*) setiap 6-12 jam untuk disebarkan kepada CMT dan pimpinan departemen terkait.
- Penilaian Cepat Dampak Bisnis (*Rapid Business Impact Assessment*):
 - Aksi: Identifikasi proses bisnis kritis, karyawan kunci, dan aset vital yang paling rentan terdampak oleh lokasi geografis (dekat pusat pemerintahan, area demonstrasi) atau fungsi bisnisnya.
 - Penanggung Jawab: Koordinator BCM, Kepala Departemen Operasional.

- Komunikasi Internal Awal:
 - Aksi: Kirimkan pemberitahuan kewaspadaan kepada seluruh karyawan. Aktifkan *Call-Tree* untuk *update* kondisi operasional Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Isinya mencakup imbauan untuk tetap tenang, menghindari area rawan, dan mengutamakan keselamatan pribadi. Sediakan nomor kontak darurat perusahaan.
 - Penanggung Jawab: Departemen HR & Komunikasi Internal.

Fase 2: Mitigasi dan Perlindungan (*Protective Measures*)

Tujuan: Melindungi personel, aset, dan operasional inti dari dampak langsung insiden.

- Keselamatan dan Keamanan Personel:
 - Aktifkan kebijakan Bekerja dari Rumah (*Work From Home*) untuk karyawan yang fungsinya tidak kritis untuk berada di kantor.
 - Untuk karyawan yang harus bekerja di lokasi, terapkan jam kerja fleksibel untuk menghindari jam sibuk atau waktu demonstrasi. Sediakan opsi transportasi yang lebih aman jika diperlukan. Menyediakan *secondary alternate site* apabila akses ke Lokasi Kerja Utama atau Lokasi Kerja Alternatif tidak bisa dijangkau.
 - Verifikasi kembali data kontak darurat seluruh karyawan dan lakukan simulasi sistem pelaporan kondisi darurat (misal: "Saya Aman" melalui aplikasi internal atau grup WhatsApp).
 - Penanggung Jawab: Departemen HR & Keamanan.
- Pengamanan Aset Fisik:
 - Perkuat keamanan di semua lokasi fisik (kantor, pabrik, gudang). Tambah personel keamanan di titik-titik vital, pastikan CCTV berfungsi penuh, lakukan penguncian akses di luar jam kerja secara lebih ketat, dan pastikan kesiapan alat pemadam kebakaran (APAR).
 - Amankan dokumen-dokumen penting dan data cadangan (backups) di lokasi yang aman (termasuk *off-site backup*). Siapkan perlengkapan darurat seperti papan untuk melindungi jendela kaca jika diperlukan.
 - Penanggung Jawab: Kepala Keamanan & Manajer Fasilitas.
- Kelangsungan Operasional dan Rantai Pasok:
 - Hubungi pemasok dan mitra logistik utama untuk memahami potensi gangguan di pihak mereka. Aktifkan pemasok atau rute pengiriman alternatif yang telah diidentifikasi dalam BCP (*Business Continuity Plan*).
 - Tingkatkan stok untuk material kritis jika memungkinkan, sebagai antisipasi gangguan logistik jangka pendek.
 - Penanggung Jawab: Kepala Departemen Logistik /Pengadaan/ Operasional
- Penguatan Keamanan Siber:
 - Tingkatkan pemantauan lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Kirimkan pengingat kepada karyawan tentang risiko phishing dan malware yang sering meningkat di tengah isu sosial-politik.
 - Pastikan semua sistem kritis telah di-*patch* dan sistem keamanan (*firewall, antivirus*) telah diperbarui.
 - Penanggung Jawab: Departemen IT/Keamanan Informasi.

Fase 3: Respons Aktif dan Manajemen Krisis (*Active Response*)

Tujuan: Mengelola insiden yang terjadi secara efektif dan meminimalkan dampaknya.

- Manajemen Komunikasi Krisis:
 - Siapkan draf pernyataan resmi untuk berbagai skenario (misalnya, jika operasional terganggu, jika ada karyawan terdampak, atau jika perusahaan disebut dalam konteks isu politik).
 - Tetapkan satu juru bicara resmi untuk menghindari simpang siur informasi. Batasi komunikasi karyawan di media sosial yang mengatasnamakan perusahaan.
 - Penanggung Jawab: Departemen Komunikasi/Humas.

- Dukungan Karyawan (Prioritas Karyawan Perempuan):
 - Sediakan dukungan psikologis atau layanan konseling, makanan dan minuman, dan *inventory* kantor bagi karyawan yang merasa cemas atau terdampak secara langsung oleh situasi.
 - Jika ada karyawan yang terjebak atau terluka, aktifkan tim tanggap darurat untuk memberikan bantuan medis, logistik, atau evakuasi sesuai prosedur.
 - Penanggung Jawab: Departemen HR.
- Koordinasi dengan Pihak Eksternal:
 - Jalin komunikasi dengan otoritas keamanan setempat untuk mendapatkan informasi terkini dan melaporkan potensi ancaman terhadap properti perusahaan.
 - Berkomunikasi secara proaktif dengan pelanggan dan mitra kunci jika terjadi potensi keterlambatan layanan atau disrupsi, serta jelaskan langkah-langkah yang sedang diambil.
 - Penanggung Jawab: Kepala Keamanan & Departemen Humas/Manajemen Akun.

Fase 4: Pemulihan dan Evaluasi (*Recovery & Review*)

Tujuan: Mengembalikan operasional ke kondisi normal dan mengambil pelajaran dari insiden.

- Aktivasi Rencana Pemulihan:
 - Setelah situasi dinyatakan kondusif oleh pihak berwenang, lakukan penilaian kerusakan (aset fisik, data, reputasi).
 - Aktifkan rencana pemulihan bisnis (*Business Recovery Plan*) secara bertahap, dimulai dari fungsi-fungsi paling kritikal.
- Komunikasi Pemulihan:
 - Informasikan kepada seluruh karyawan, pelanggan, dan mitra mengenai rencana kembali beroperasi secara normal.
- Evaluasi Pasca-Insiden (*Post-Incident Review*):
 - Setelah operasional pulih sepenuhnya, adakan pertemuan evaluasi dengan CMT dan seluruh pihak terkait.
 - Lakukan analisis: Apa yang berjalan baik? Apa saja kekurangannya? Apakah prosedur BCMS efektif? Apakah ada celah dalam rencana?
 - *Output*: Perbarui dokumen BCP, rencana respons insiden, dan kebijakan terkait berdasarkan pembelajaran dari krisis ini.

3. Penutup

Rilis ini terutama ditujukan sebagai kerangka acuan bagi Anggota InCRA dan dapat juga digunakan oleh dunia usaha dan organisasi publik lainnya.

Jakarta, 2 September 2025
Pengurus Pusat InCRA


Roy Kusumawardhana
Ketua Umum


Yuhisman
Sekretaris Jenderal